

**OTONOMI DAERAH SEBAGAI STRATEGI MEMPERCEPAT
PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA INDONESIA**



Mohamad Arfiansyah Putra

0320220015

Manajemen Informatika

Politeknik Astra

PENDAHULUAN

Menurut (Abimanyu, 2009) Konsep otonomi daerah, yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia, adalah strategi inovatif yang dirancang dengan cermat untuk mempercepat dan memajukan pertumbuhan ekonomi di seluruh bangsa. Dalam pendekatan ini, pemerintah pusat, dalam usahanya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, memberikan sejumlah otoritas kepada daerah-daerah untuk mengelola dan membina sumber daya mereka sendiri serta menentukan arah pembangunan mereka. Otonomi daerah ini merupakan langkah revolusioner, yang tidak hanya memberikan kekuasaan lebih kepada daerah-daerah, tetapi juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah tersebut. Ini juga merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam membangun dan memperkuat ekonomi bangsa. Melalui pendekatan ini, setiap daerah memiliki peluang untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal kepada perekonomian nasional.

Di Indonesia, upaya serius untuk melaksanakan desentralisasi dimulai setelah masa krisis tahun 1997/1998. Secara formal desentralisasi mulai berlaku sejak 1 Januari 2001, pada masa ini dasar hukum pemberlakuan desentralisasi dibuat undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yakni Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian Undang-Undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

PEMBAHASAN

Prinsip otonomi daerah merupakan salah satu konsep kunci dalam sistem pemerintahan yang tidak hanya mempengaruhi cara kerja lembaga pemerintah, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan konsep ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan lebih besar untuk merencanakan,

mengimplementasikan, dan memonitor kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Menurut (Nasution, 2020) Konsep otonomi daerah ini mendorong dan memfasilitasi kebebasan bagi inisiatif lokal, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kapasitas dan otoritas yang lebih besar untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan aspirasi masyarakat lokal. Ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PDRB per kapita memiliki hubungan yang lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerahnya dan berpengaruh secara signifikan untuk nasional baik pada periode 1990 -2011 maupun pada periode sebelum desentralisasi, 1990 -2000. Sementara itu makin besar porsi investasi dalam output mestinya memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun observasi nasional justru memberi efek yang berlawanan untuk periode sebelum dan sesudah desentralisasi dan periode sebelum desentralisasi yakni peningkatan investasi mempunyai korelasi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian daerah yang sudah mencapai performa pendidikan yang mapan memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan ditunjukkan oleh variabel schooling dengan pertumbuhan PDRB pada periode 1990-2000 namun dengan arah yang berlawanan. Di lain pihak, kemandirian fiskal suatu daerah terbukti memberi hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terutama terbukti setelah periode desentralisasi fiskal (2001-2011) yakni apabila kemandirian fiskal (DDF) meningkat 3% maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Menurut (Sabrina, 2022) untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan sinergi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dukungan yang dibutuhkan baik dalam bentuk teknis maupun finansial kepada daerah. Dukungan tersebut bisa berupa pelatihan yang ,berkualitas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, bantuan teknis yang tepat guna, atau pendanaan yang cukup untuk proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berdampak luas.

Di sisi lain, daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan mereka. Ini bukan hanya

berarti bahwa mereka harus dapat menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan otoritas yang mereka miliki dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif, tetapi juga mereka harus dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan lokal sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan lokal. PDRB per kapita berhubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pentingnya otonomi daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Meskipun investasi diharapkan memberikan dampak positif, observasi nasional menunjukkan efek yang berlawanan. Performa pendidikan yang mapan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan.

Kemandirian fiskal daerah, terutama setelah desentralisasi fiskal, memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kemandirian fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan setiap peningkatan 3% dalam Dana Dekonsentrasi dan Dana Desa (DDF) dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Untuk mengatasi tantangan, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis dan finansial, sementara daerah harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Saran meliputi penguatan otonomi daerah, optimalisasi investasi, fokus pada pendidikan, penguatan kemandirian fiskal, dan peningkatan sinergi pusat-daerah yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal perlu ditingkatkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. S., & Megantara, A. (2009). Otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 151-168.
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Bratakusumah, Deddy, & Dadang Solihin. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, AP (2020). Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* , 1 (2), 208-212.
- Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* , 22 (1), 53-61.
- Windusancono, BA (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Mimbar Administrasi* , 18 (1), 89-105.